

**PERAN KEPALA DESA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA RAWANG OGUANG
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PERIODE 2014-2019**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu
Administrasi Negara*



OLEH :

CACA ANDIKA
NPM : 160411021

**PROGRSM STUDI ADMINIDTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2019

NAMA : CACA ANDIKA

NPM : 160411021

UNIVERSITAS : Islam Kuantan Singingi

FAKULTAS : Ilmu Sosial

PROGRAM STUDI : Administrasi Negara

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

SAHRI MUHARAM., S.Sos., M.SI
NIDN. 1021117906

SARJAN.M., S.Sos., M.SI
NIDN. 1022018302

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

(DESRIADI., S.Sos., M.Si)
NIDN. 1022018302

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa Dan Disahkan Oleh Panitia Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Hari : Senin
Tanggal : 19
Bulan : Oktober
Tahun : 2020

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

ZUL AMMAR,SE.,ME

DESRIASI,S.Sos,M.Si

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. SAHRI MUHARAMS.S.Sos,M.Si | (.....) |
| 2. SARJAN.M,S.Sos,M.Si | (.....) |
| 3. EMILIA EMHARIS,S.Sos,M.Si | (.....) |
| 4. ALSAR ANDRI,S.Sos,M.Si | (.....) |

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,

ZUL AMMAR,SE.,ME

PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **"Peran Kepala Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singing Periode 2014-2019"** yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata I(S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah digunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di perguruan tinggi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam sumber sebagaimana mestinya.

Teluk kuantan, 30 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

CACA ANDIKA
NPM. 160411021

MOTTO

***JIKA ORANG LAIN BISA,
MAKA
AKU JUGA PASTI BISA !!***

=====

***BELIEVE
IN
YOURSELF
!!***

(CACA ANDIKA)

KATA PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, ku persembahkan karya kecilku ini
untuk orang – orang yang ku sayangi*

Orang tua

*seorang motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan ku,
atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkan ku sampai ke titik ini.*

Kakak

*Saudara sekaligus teman dekat yang selalu memberi semangat dan dukungan
dalam hal apapun.*

*Dan semua teman – teman yang tak bisa ku sebutkan satu per satu, yang selalu
menemani dan sama-sama berjuang dalam perjuangan pendidikan untuk meraih
gelar kesarjanaan, terimakasih untuk semua.*

SERTA ALMAMATER TERCINTA

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

By. Caca Andika

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim....

Alhamdulillahirabbilalamin Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2019”**. Ucapkan sholawat dan salam, allahummasali’ala Muhammad wa’ala ali Muhammad semoga allah melimpahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW yang telah memimbing manusia kejalan yang terang benderang mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun dari segi pembahasan skripsi ini

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Zul Ammar, SE. ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Desriadi, S.Sos. M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Bapak Sahri Muharam S.Sos.M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran – saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Sarjan.M, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan ibu dosen beserta staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Kepada orang tua, kakak, abang, serta adik yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
9. Serta teman-teman seperjuangan Program Studi Adminitrasi Negara kelas angkatan 2016 terimakasih atas motivasi, dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Butuh lembaran yang luas untuk berjuta nama tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa semua, hanya ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Semoga Allah SWT selalu memberi maafaat bagi semua yang membaca tulisan ilmiah ini dan semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Akhir kata peneliti mphon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan dalam tulisan ilmiah ini.

Taluk Kuantan , 30 Agustus 2020

CACA ANDIKA
NPM.160411021

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan penelitian	9
1.4 Mamfaat penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan pustaka	11
2.1.1 Administrasi Negara.....	11
2.1.2 Peran	15
2.1.3 Pemerintahan Desa.....	18
2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat	32
2.1.5 Strategi Pemberdayaan.....	39
2.1.6 Peran Kepala desa dalam pemberdayaan masayarakat	41
2.2 Kerangka Pikir	43
2.3 Hipotesis	44
2.4 Defenisi operasional.....	44
2.5 Teknik Pengukuran	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Informan Penelitian.....	48
3.3 Jenis dan sumber data	49
3.4 Fokus penelitian	49
3.5 Lokasi Penelitian.....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7 Teknik Analisis Data.....	51
3.8 Jadwal kegiatan penelitian	53

BAB IV <u>G</u> AMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	55
4.1 Sejarah Desa Rawang Oguang	55
4.2 Keadaan Geografis	56
4.3 Keadaan Jumlah Penduduk	57
4.4 Sarana dan Prasarana Desa.....	60
4.5 Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa	61
4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rawang Oguang	62
BAB V <u>H</u> ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
5.1 Identitas Informan.....	65
5.2 Hasil dan pembahasan penelitian peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.	69
BAB VI <u>P</u> ENUTUP	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Jenis pemberdayaan desa Rawang Oguang	7
Tabel II.1 : Indikator Dan Item Penilaian	45
Tabel III.1 : Informan Penelitian	49
Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitaian	54
Table IV.1 : Pembagian luas wilayah	57
Table IV.2 : Jumlah penduduk	58
Tabel IV.3 : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	58
Table IV.4 : Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur	59
Tabel IV.5 : Jumlah penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan	59
Table IV.6 : Sarana dan prasarana	60
Table IV.7 : Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan masyarakat	61
Table V.1 : Jumlah Informan	66
Tabel V.2 : Jumlah informan Berdasarkan Tingkatan Umur	67
Table V.3 : Jumlah informan Berdasarkan Tingkatan Pendidikan	67
Table V.4 : Jumlah informan Berdasarkan Jabatan	68
Table VI.1 : Hasil Wawncara	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	62
Gambar IV.2 : Struk Organisasi BPD.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 : Daftar quisioner wawancara.....	88
Lampiran II : Foto wawancara peneliti dengan informan	90

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA RAWANG OGUANG KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN Kuantan SINGINGI

Oleh:

CACA ANDIKA
NPM. 160411021

Dalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa peran kepala dalam program pemberdayaan masyarakat di desa Rawang Oguang tidak berperan.

Kata Kunci: Peran, pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN RAWANG OGUANG VILLAGE KUANTAN HILIR SEBERANG DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT

By:

CACA ANDIKA
NPM.160411021

In developing the village community, especially in the socio-economic field, a leader is needed, in this case the Village Head who is expected to function as a source of innovation, guide, direct and function as a communicator to convey ideas or ideas to the village community, to achieve a standard of living better. The purpose of this study was to determine the role of village heads in community empowerment in the village of Rawang Oguang, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. This research was conducted in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang District. The research method used is qualitative research, data collection techniques are interviews, observation and documentation. Based on observations it is known that the role of the head in community empowerment in the village of Rawang Oguang has not been well implemented.

Keywords: *Role, community empowerment.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang berbentuk republik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) undang – undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi”Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk replubik”. Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksudkan diatas adalah didirikan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini terlihat jelas dalam pembukuan (preamble) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yaitu Melindungi segenap bangsa dan Negara dan seluruh tumpah daran Indonesia, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Memajukan kesejahteraan umum; dan, Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga yang akan melaksanakan ketatanegaraan yang disebut dengan pemerintah. Pemerintah itu dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Selain itu wakil presiden, presiden dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh mentri yang membidangi departemen tertentu. Mentri itu dipilih secara prerogratif oleh presiden itu sendiri.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, hal ini dikarenakan banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia baik pulau kecil maupun pulau besar. Pulau – pulau yang ada di Indonesia berjumlah 17.000 yang

membentang dari sabang sampai marauke. Dengan jumlah sebanyak itu tentu tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat luas wilayahnya. Untuk itu maka dibentuklah daerah – daerah guna menjalankan tugas pemerintahan di daerah masing – masing. Ini sesuai dengan bunyi pasal 18a Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yaitu”Negara Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang – Undang.

Pemerintah Indonesia menetapkan suatu Peraturan Perundang – Undangan yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota, maka dibagilah urusan - urusan pemerintahan itu. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah pembagian urusan itu antara lain Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Menoter dan fiskal nasional dan Agama.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Perencanaan, pemamfaatan, dan pengawasan tata ruang, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana umum, Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggarakan pendidikan dan alokasi sumber danya manusia potensial,

Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota, Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota, Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota, Pengendalian lingkungan hidup, Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota, Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, Pelayanan administrasi umum, Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi, Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana umum, Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan pendidikan, Penanggulangan masalah sosial, Pelayanan bidang ketenagakerjaan, Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, Pengendalian lingkungan hidup, Pelayanan pertanahan, Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, Pelayanan administrasi umum pemerintahan, Pelayanan administrasi penanaman modal, Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dibentuklah pemerintahan desa yang berada dilingkungan kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 200 ayat (1) Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi”dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerinthan desa dan badan permusyawaratan desa”. Pemeritahan desa tersebut kemudian diberikan wewenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa yang disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia

Desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sedangkan Kelurahan mengurus kepentingan masyarakat serta pemerintahannya berdasarkan tugas dari Pemerintah Kabupaten atau Kota, sehingga kelurahan tidak memiliki hak otonomi seperti yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa. Pada hakekatnya yang menjalankan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Khususnya Kepala Desa sebagai pemimpin yang mempunyai kebijakan dalam mengelola Pemerintahan Desa diharapkan lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi Desa.

Kepala Desa Mempunyai tugas dan Kewajiban yang telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana salah satu tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan Kepala Desa diwajibkan lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Otonomi Desa yaitu kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin mempunyai tugas yang salah satu diantaranya adalah mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan itu sendiri akan mencapai hasil yang maksimal, jika peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dalam tugas tersebut Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan.

Peran Kepala Desa dalam pemberdayaan menurut Siagian meliputi stabilisator yaitu menciptakan suasana yang stabil dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan lancar tanpa adanya hambatan yang bersifat menghancurkan karena menjalankan sebuah Desa yang dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan dan kesentosaan bersama diperlukan Kepala Desa yang bisa mengatur atau mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan, Peran inovator, berarti Kepala Desa secara keseluruhan bisa

menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan.

Peran pelopor yaitu Dalam hal ini Kepala Desa harus mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam proses pembangunan, juga harus dapat memberikan contoh tentang daya gerak dan kemampuan kerja yang lebih cepat sehingga masyarakat dapat terpengaruh, dan peran modernisator, seorang kepala desa diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama. Seorang kepala desa harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi pola pemikiran modern untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicita-citakan. Kepala desa selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan program pembangunan didesanya di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian rakyat.

Desa Rawang Oguang merupakan salah satu desa dikecamatan Kuantan Hilir Seberang yang mekar dari desa induk yaitu desa Sungai Sorik pada tahun 2012, dengan terpisahnya desa Rawang Oguang dari desa induk dan menjadi sebuah desa baru dan memiliki kepala desa sebagai pemimpin di desa tersebut, tentu segala bentuk kegiatan desa dilakukan oleh desa itu sendiri salah satunya pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang diselenggarakan oleh Kepala Desa meliputi pemberdayaan fisik dan nonfisik sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut :

Table I.1 :Jenis Pemberdayaan Masyarakat Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Tahun 2014-2019

No	Jenis Pemberdayaan	Jumlah
1	Pemberdayaan fisik : - Semenisasi jalan	500 M
2	Pemberdayaan non fisik:	
	- Bantuan ternak (sapi)	20 ekor
	- Posyandu balita	56 orang
	- Posyandu lansia	52 orang
	- Kelompok PKK	1 kelompok

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

Namun kenyataannya peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat belum terlaksana sesuai harapan, tidak terlihatnya peran stabilistator, innovator, pelopor dan peran modrenistator. Hal ini terbukti dari ketidak stabilan ekonomi desa tersebut dimana masih terdapat masyarakat yang tidak mampu, kepala desa jarang meluangkan waktu untuk masyarakat yang ingin bertemu walaupun malam hari dan diluar jam kantor untuk mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama. Kepala Desa yang jarang memberikan motivasi, wawasan ataupun sesuatu yang baru yang belum diketahui masyarakat. Kepala Desa belum pernah memberikan suatu pelatihan terhadap masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan ketrampilan masyarakat tetapi hanya memberikan suatu motivasi terhadap masyarakat memanfaatkan segala potensi yang ada dilingkungan.

Dalam menciptakan kestabilan perekonomian kepala desa terlihat tidak terlalu memikirkan keadaan masyarakat, karena beberapa program yang dijalankan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak faham maksud dan tujuan dari program tersebut, kurangnya interaksi kepala desa dalam lingkungan pergaulan masyarakat setempat sehingga peran kepala desa sebagai pengatur pelaksana interaksi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, diketahui masyarakat desa Rawang Oguang memiliki berbagai keahlian namun belum bisa dikembangkan karena kepala desa belum pernah mengadakan suatu pelatihan ataupun pendidikan tertentu terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan serta wawasan masyarakat tersebut.

Desa Rawang Oguang juga memiliki berbagai sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan hasilnya untuk masyarakat, dengan lahan seluas ± 100 Ha seperti lahan pertanian, dan lahan sawah namun belum bisa dikembangkan karena kepala desa belum melakukan pengolahan sumberdaya alam dengan baik yang dapat menguntungkan bagi masyarakat setempat. Selama ini masyarakat terbentur dalam pengolahan sumberdaya alam yang dimiliki disebabkan minimnya dana karena masyarakat hanya menggunakan dana pribadi.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan mengenai peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat di desa Rawang Oguang peneliti menemukan fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya peran kepala desa dalam menstabilkan perekonomian desa,
2. Kurangnya peran kepala desa dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang ada,
3. Kurangnya peran kepala desa dalam mengembangkan sumberdaya alam yang dimiliki.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2019"**.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran Kepala Desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Mamfaat penelitian

- 1.3.1 Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan,

- 1.3.2 Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa,
- 1.3.3 Memberikan masukan bagi pemerintah desa di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang mengenai peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat,
- 1.3.4 Memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa Rawang Oguang kecamatan kuantan hilir seberang mengenai peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa,
- 1.3.5 Untuk menambak koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Negara pada khususnya dan mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan pustaka

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman terotitis yang dapat membantu. Untuk itu disusun kerangka teori yang memuat pokok – pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana permasalahan tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkain asumsi, konsep, defenisi dan profosisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara menghubungkan antara konsep.

Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

2.1.1 Administrasi Negara

Menurut Sugiyon dalam Jamaluddin (2015:100) teori ilmu adminstrasi negara mengajarkan bahwa pemerintah Negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua fungsi utama,yaitu pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara modern sebagai suatu negara hokum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai suatu Negara kesejahteraan (*wealfare state*), dan dari dua fungsi ini menyangkut dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam Jamaluddin (2015: 100) sekitar tahun 80-an berkembang konsep yang berlabel baru untuk memberdayakan konsep tersebut antara lain ada yang

menyebut *New Publik Administration* (Bellone, 1980), *The New science of organization* (Ramos, 1981) dan terakhir sekitar tahun 1990-an muncul konsep disebut *New Public Management* (Ferlie, 1996). Yang pada hakekatnya berupaya untuk mencerahkan konsep ilmu administrasi Negara.

Dalam Faried Ali (2015:11) teori yang terlahir dari hasil penelitian dapat berkedudukan menjadi asas dan oleh karena itu ia tidak dapat dibantah karna keberlakuannya yang umum (universal). Sedangkan teori yang dapat dibantah, tetapi teori yang masih terus dilakukan pengkajian dan penelitian atas kebenarannya. Ia dapat menghasilkan sejumlah hipotesis yang dapat dibuktikan melalui penelitian pemikiran atau pendapat dari seorang ahli menyangkut batasan pengertian atas suatu konsep adalah suatu pemikiran yang sejajar dengan teori, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai teori. Pemikiran dan/atau pendapat seseorang lahir dari kemampuan. Otoritasnya melihat suatu objek dalam suatu lokus atau pendekatan–pendekatan tertentu (definisi atau batasan tentang administrasi yang di kemukakan oleh Waldo), sebagai kerja sama manusia yang didasarkan pada pembagian kerja secara rasional dalam mencapai tujuan bersama.

Rumusan atau definisi ini memperlihatkan ”kerja sama manusia” sebagai objek dari lokus atau pendekatan pembagian kerja yang rasional. Pemikiran yang diapresiasi dalam bentuk definisi ini tentunya didasari oleh pemikiran filsafat yang menjadi dasar belakang perumusannya. Pemikiran Waldo jelas berdasarkan pada pemikiran filsafat rasionalisme, kebenarannya bersifat koheren. Dari pemikiran tersebut penulis berpendapat administrasi adalah kerja sama manusia yang tidak saja berdasarkan pada pertimbangan rasio, tetapi juga atas dasar realitas

empiric tentang esensi eksistensi manusia dalam mencapai tujuan bersama. (Ali Tarded:2004)

Menurut Prajudi (Inu Kencana 2010:2) menyatakan bahwa ilmu harus ada objeknya, terminology yang khas, metodologi yang khas, fhisolofisnya yang khas, dan teorinya yang khas.

Menurut Simoon dalam Kencana (2010:13) menjelaskan bahwa administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama

Menurut Leonard dalam kencana (2010:13), menjelaskan administrasi sebagai sutu proses yang umum pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Sedangkan menurut Siagian (2010:13), menjelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan itu oada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentuan sebelumnya.

Pengertian Negara menurut Aristoteles (2010:20), ia menjelaskan bahwa Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Hugo de Grool (2010:20), menyatakan bahwa Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Sumantri (2010:20), ia menjelaskan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan oleh karnanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau aat pelengkap yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga

yang bertempat tinggal diwilayah kekuasannya. Sedangkan menurut Djokosoentoso (2010:20), ia menjelaskan bahwa Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama.

Pengertian publik yaitu publick berasal dari bahasa inggris yaitu publik yang berarti umum, masyarakat atau Negara. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan praja, hanya sejak zaman Belanda kata –kata sanksekerta tersebut sudah salah kapra. Arti sebenarnya dari kata-kata tersebut adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan rakyat diberi istilah pamoong praja (pelayan rakyat).

Pengertian administrasi publik menurut Nigro (2010:24), ia menjelaskan bahwa administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, yang meliputi tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif serta hubungan antar mereka, yang mengacu kepada pelaksanaan penyertaan yang dibuat oleh pejabat yang diakui dan ditunjuk untuk kepentingan kolektif lebih lanjut. Menurut Prajudi Atmosudirjo (2010:25), ia menyatakan bahwa administrasi publik adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan bersifat kenegaraan. Menurut Arifin Abdulrachman (2010:25), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara, sedangkan menurut Edward H. Litchfield (2010:25), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana berbagai macam-macam badan

pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaga nya, dibiayai, digerakan, dan di pimpin.

Administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

2.1.2 Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarlito Sarwono (2011: 224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas juga memberikan peristilahan dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut,
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku,
- d. Kaitan orang dengan perilaku.

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas.

Peranan didefinisikan dari masing – masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan Biddle dan Thomas diatas, peran lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang didalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Maka peranan menurut Mifta Thoha dapat dirumuskan “ sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur , yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu”, atau dengan kata lain “peranan” adalah Perilaku bagaimana yang harus dimainkan atau diwakti oleh seseorang dalam suatu organisasi.

Definisi peran menurut Soerjono Soekanto (2006: 212), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi peran menurut Soerjono Soekanto diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peran berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan sperannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

Ada perbedaan halus antara peran dan fungsi, Peran dapat didefinisikan hanya sebagai bagian yang dimainkan oleh seseorang dalam situasi tertentu sementara fungsi mengacu pada tujuan alami dari sesuatu atau kewajiban seseorang.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Adapun penjelasan dan tugas masing – masing pemerintah desa sebagai berikut :

2.1.3.1 Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
7. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa Sesuai dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa antara lain: Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab.

Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan diwilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga kepala desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Menurut Siagian (2018:142) peran kepala desa dalam pembangunan desa antara lain:

1. Stabilisator

Stabilisator adalah orang yang mampu bekerjasama dalam suasana kestabilan administrasi tanpa dipengaruhi oleh hambatan yang terjadi yang mungkin terjadi diluar organisasi pemerintah baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan serta keamanan yang dapat menunjang lajunya pertumbuhan pembangunan. Dalam hal ini perlu peran Kepala Desa, bila keadaan kondisi

lingkungan maupun masyarakat tidak stabil maka sulit untuk diselenggarakannya berbagai kegiatan pembangunan, karena salah satu peran yang penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif adalah sebagai stabilisator yaitu menciptakan suasana yang stabil dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan lancar tanpa adanya hambatan yang bersifat menghancurkan karena menjalankan sebuah Desa yang dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan dan kesentosaan bersama diperlukan Kepala Desa yang bisa mengatur atau mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Kabitmas (keamanan, ketertiban masyarakat) dan perlindungan yang merupakan upaya menciptakan kondisi yang tertib dan aman sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban.⁷ Kepala Desa juga dapat berperan sebagai pengatur pelaksana interaksi yang terjadi dalam lingkungan pergaulan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga dapat berjalan secara harmonis.

Peranan selaku Stabilisator Kepala Desa bisa berupa tindakan dilakukan antara lain :

- a. Menjaga ketertiban antar suku, dilingkungan RT, RW, Dusun dan Desa (mendamaikan perselisihan).
- b. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban (program siskamling).

- c. Menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat Desa (simpan pinjam).
- d. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa (program gotong royong).
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa (program pendidikan dan latihan).

2. Inovator

Inovator adalah ditinjau dari administrasi pembangunan, inovator yaitu orang yang mampu menemukan hal-hal yang baru, ide yang baru, dan sistem yang baru dalam proses pembangunan.⁹ Sebagai inovator, berarti Kepala Desa secara keseluruhan bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan. Inovatif mencakup pengembangan gagasan baru, pemikiran baru dan mengembangkan serta menerapkan gagasan baru tersebut dalam pekerjaan. Sebagaimana diketahui inovasi berarti penemuan baru dalam cara kerja, metode baru, sistem baru dan cara berpikir baru, artinya perlu adanya kreativitas. Dimana inovator itu sendiri artinya adalah kemampuan sebagai agen pembaharuan memberikan implikasi bahwa sebagai Kepala Desa haruslah dapat berpikir strategi dan mampu mencermati berbagai perubahan secara tepat sekaligus menjawabnya karena seorang Kepala Desa yang efektif yaitu dapat memberikan pemerkasa dan mendorong perubahan serta mempersiapkan untuk menghadapi perubahan dan pengembangan antusiasme terhadap perubahan.

Tentunya kepala juga harus mendorong masyarakat sehingga dapat bekerja secara aktif tentunya dalam pembangunan. Hal yang dapat dilakukan sebagai inovator dalam pembangunan Desa misalnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat demi kemudahan kepada masyarakat Desa dalam menggunakan hak dan kewajibannya berupa penyediaan fasilitas pelayanan tentunya diperlukan adanya penyiapan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yaitu dengan prosedur dan mekanisme pelayanan yang efektif. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya Kepala Desa untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis, terencana dan terus-menerus untuk mewujudkan kehidupan masyarakat desa lebih sejahtera baik melalui pembangunan ekonomi, sosial budaya, fisik dan non fisik diperlukan metode dan prosedur yang baik untuk mencapainya tentunya diperlukan adanya peran dari Kepala Desa tersebut.

Untuk memainkan peran tersebut agar terpenuhi secara efektif maka Kepala Desa harus memiliki keabsahan yang tinggi sehingga akan lebih mudah diserap dan diterima masyarakat yang nantinya akan memperlancar terjadinya perubahan yang diinginkan. Tindakan inovatif diperlukan bagi orang-orang yang kreatif dengan cara pandang yang konsteris juga diperlukan adanya lingkungan yang inovatif pula. Peranan selaku Inovator Kepala Desa bisa berupa tindakan yang dilakukan dalam hal :

- a. Merancang dan menerapkan sumber ide baru dalam pembangunan Desa, artinya Kepala Desa harus bisa menjadi sumber ide, sumber

saran dan sumber pendapat tentang keputusan yang akan diambil disamping sebagai pelaksana keputusan yang telah diambil.

- b. Menciptakan, memperkenalkan dan menerapkan sistem, prosedur dan metode kerja baru dalam penyelesaian tugas maupun masalah yang dihadapi dalam pembangunan, artinya dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi Kepala Desa terlebih dahulu meneliti dan mendiagnosis sumber-sumber atau sebab timbulnya suatu permasalahan dan memecahkan masalah atau mencari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah dan praktis sesuai dengan kemampuan Kepala Desa sehingga nilai sosial yang sudah usang dapat ditinggalkan dan memberikan jalan kepada norma-norma sosial yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, cara kerja lebih sederhana, efektif dan efisien namun mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Pelopor

Pelopor adalah pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintah itu sendiri, secara eksplisit pandangan itu juga bahwa pemerintah harus memainkan perannya selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan berbangsa. Dengan perkataan lain, selaku pelopor harus menjadi panutan (role mode) bagi seluruh masyarakat.¹² Sebagai pelopor berarti Kepala Desa harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, orang berjalan didepan. Ini berarti kepeloporan Kepala Desa harus bersifat objektif akan menunjang kelancaran pembangunan. Dalam hal ini Kepala Desa harus mampu mendorong

seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam proses pembangunan, juga harus dapat memberikan contoh tentang daya gerak dan kemampuan kerja yang lebih cepat sehingga masyarakat dapat terpengaruh, tentunya peranan tersebut dijalankan secara efektif sehingga nantinya masyarakat relatif mudah merubah pandangan persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara kerjanya sehingga memperlancar jalannya roda pembangunan, peranan selaku pelopor dapat berupa tindakan yang dilakukan dalam hal :

- a. Memberikan contoh dalam pelaksanaan keputusan pembangunan desa.
- b. Kepeloporan dalam hal peningkatan disiplin kerja.
- c. Kepeloporan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- d. Kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

4. Modernistator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri kepada negara lain.¹³ Sederajat dalam arti perolehan pengakuan *de jure* Dalam peranan selaku modernisator, seorang kepala desa diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama. Seorang kepala desa harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi pola pemikiran modern untuk mencapai suatu tujuan

yang akan dicita-citakan. Kepala desa selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan program pembangunan didesanya di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian rakyat. Perencanaan pembangunan tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Peranan selaku modernisator dapat berupa tindakan yang dilakukan antara lain :

- a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Kemampuan dan kemahiran manajerial.
- c. Kemampuan mengolah kekayaan alam sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.
- d. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan.

2.1.3.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

1. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2.1.3.3 Sekretaris Desa

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
2. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
3. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

2.1.3.4 Pelaksana Teknis Desa

1. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah:

1. Melaksanakan administrasi kependudukan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.

5. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

2.1.3.5 Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
3. Mengelola tugas pembantuan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2.1.3.6 Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Mengelola administrasi keuangan desa.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

2.1.3.2 Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
2. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
4. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
5. Mengelola administrasi perangkat desa.
6. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

2.1.3.3 Pelaksanaan Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

1. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa

Berdasarkan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa adalah:

- a. Untuk menjamin Terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Desa di Seluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.
- b. Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa hanya mengatur Desa dan Kelurahan dari segi pemerintahannya. Dengan demikian Undang-undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan

masyarakat hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pemerintahan. Pembangunan dan ketahanan nasional dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa tidak mengarah kepada pembentukan Daerah Otonomi tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa walaupun Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi hak tersebut bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Telah ditetapkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan berbagai peraturan sebagai kebijaksanaan pelaksanaannya, diharapkan akan dapat makin mantap penyelenggaraan pemerintahan Desa secara terpadu dan menyeluruh sehingga terwujud hubungan yang jelas antara sistem penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015.

Program tahunan dalam rencana kerja yang disusun oleh pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan yang kebijaksanaan dan sistem penyelenggaraan pemerintah Desa yang selama ini diatur dengan berbagai kebijaksanaan Daerah menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa secara Nasional dengan pola yang seragam ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 adalah merupakan pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa. Oleh karena itu dalam melakukan pengkajian terhadap materi Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 dan berbagai

peraturan pelaksanaannya diperlukan adanya ketelitian dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan suatu penafsiran yang keliru.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.

Selanjutnya pemberdayaan menurut Ife (dalam Suhendra, 2006:77) adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage).

Menurut Adisasmita (2006:35) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

1. Aspek masukan atau input Seperti Sumber Daya Manusia (SDM), dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi.
2. Aspek proses Seperti pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.
3. Aspek keluaran dan output Seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang sterbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang

berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 7).

Terkait definisi Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja adalah: Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003:169).

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara itu Vindyandika (2004: 36) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis

dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi. Kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas

permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya. Kartasasmita mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

- a Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan,

dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.

- b Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- c Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat (Kartasasmita, 1996: 23)

Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2002:179).

Menurut Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada

kemandirian.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:3), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri(*self help*)

b. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity bulding*, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.

c. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

2.1.5 Strategi Pemberdayaan

Strategi merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap kelompok atau perseorangan untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut, akan tetapi dalam menentukan strategi pemberdayaan harus dilaksanakan dengan metode yang sesuai. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun

pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Menurut Parsons menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan, sebagai berikut : Aras Mikro, Aras Mezzo, dan Aras Makro.(Parsons et.el, 1994, h,112). Sedangkan menurut Suharto pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan pemeliharaan (Suharto, 2005 h, 66-67). Selanjutnya menurut Dubois dan Miley memberikan cara atau teknik yang lebih spesifik dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu : Membangun relasi pertolongan; Membangun komunikasi; ikut Terlibat dalam pemecahan masalah(Dubois dan Miley, 1992 h,211)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa strategi pemberdayaan merupakan cara atau metode yang diterapkan dalam pemberdayaan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam menentukan segala strategi pemberdayaan harus berhubungan langsung dengan obyek pemberdayaan yaitu manusia untuk dibimbing, diarahkan dalam menjalani dan memandang sisi kehidupan yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik demi kesejahteraan hidupnya.

2.1.6 Peran Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat

Dalam proses pembangunan desa, peranan kepala desa juga sangat besar. Menurut pengamatan Hofsteede (1992) Para kepala desa yang diteliti menunjukkan bahwa mereka sebagai pengambil prakarsa dalam suatu proyek pembangunan. Mereka mendiskusikan dan seterusnya merapatkan dalam rapat desa untuk mengambil keputusan pelaksanaan suatu proyek.

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika (1996:56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Robert Dahl (1983:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.

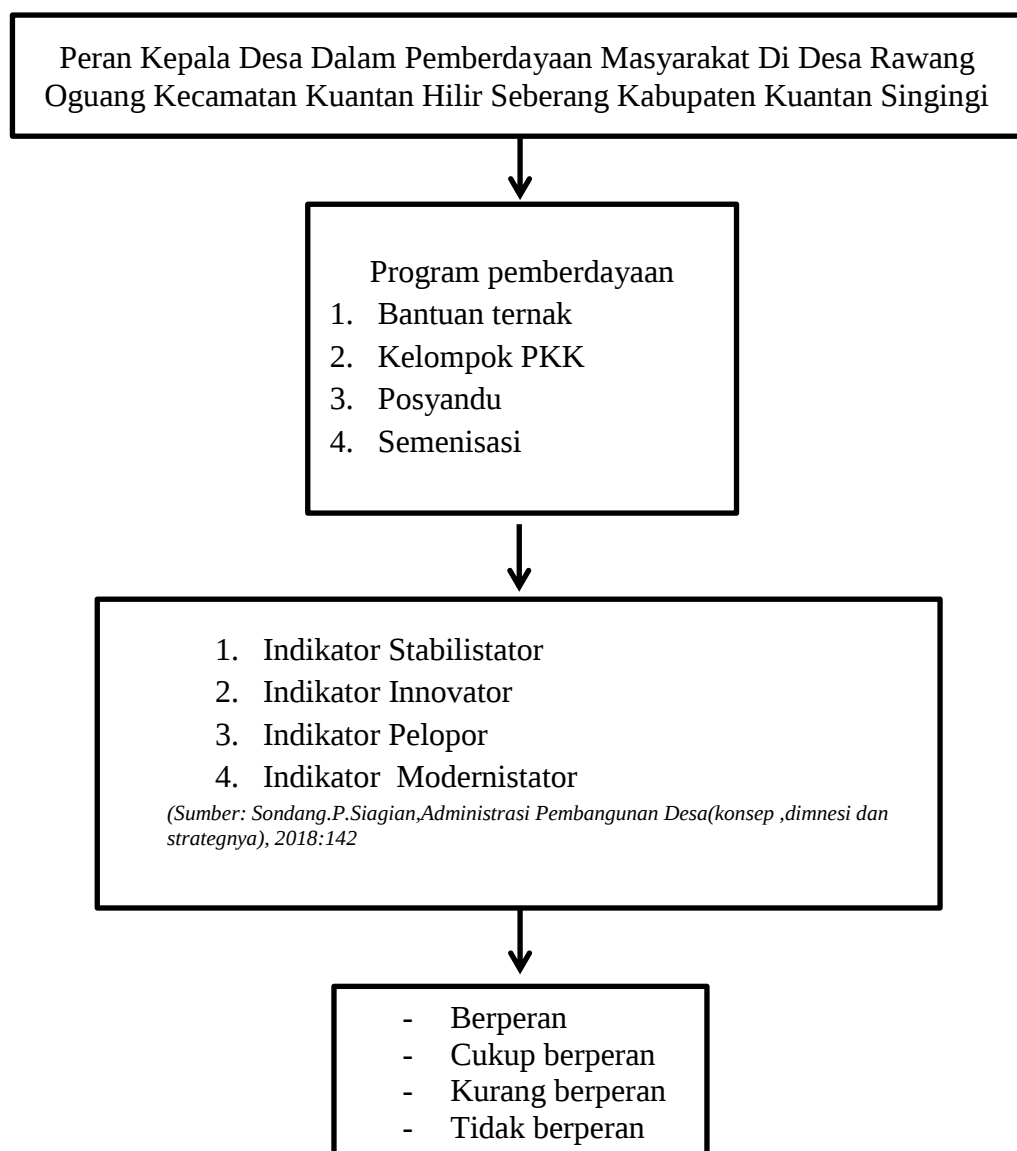
Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) kekuatan merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan peran kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kebanyakan kepala desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata. Mereka bagaikan raja-raja kecil di desanya. Hal itu ditambah sikap masyarakat yang bersifat paternalistik. Kedua, kepala desa mempunyai posisi yang sangat kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Hal ini karena bupatilah yang membuat keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya, meskipun kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung.

2.2 Kerangka Pikir

Dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dan indikator-indikator penentu berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pemikiran tersebut penulis sajikan seperti pada gambar berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikir Tentang Peran Kepala Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi



2.3 Hipotesis

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian, hipotesis merupakan salah satu unsur penting yang mewujudkan ada tidaknya hubungan atau pengaruh diantara variabel dalam penelitian, sehingga dapat memberikan arah bagi peneliti untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis yang perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang mempunyai kemungkinan benar atau salah yang dinyatakan berdasarkan pengamatan atas pertimbangan rasional.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesa yang peneliti ambil yaitu peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi tidak berperan.

2.4 Defenisi operasional

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di pengaruhi oleh indikator pembinaan dan koordinasi maka penulis merasa perlu menjelaskan bahwa dalam konsep operasional ini, yang dimaksud dengan :

- 2.4.1 Peran : Usaha atau kemampuan maupun perilaku dari Kepala Desa yang menduduki jabatan di Desa untuk dapat menggerakan serta menumbuhkan rasa kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam menciptakan suatu tujuan yaitu tumbuh dan berkembang menuju
- 2.4.2 Stabilisator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan.

- 2.4.3 Inovator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.
- 2.4.4 Pelopor : Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang pembangunan.
- 2.4.5 Modernistator : Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan.

Operasional indikator menurut item penilaian dalam peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel II.1 : Indikator Dan Item Penilaian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
Peran kepala desa dalam Pemberdayan masyarakat	Stabilistator	1. Kestabilan ekonomi desa 2. Kesejahteraan sosial masyarakat	Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan, Tidak Berperan,
	Inovator	1. Pengambilan keputusan 2. Pemecahan masalah	Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan, Tidak Berperan,
	Pelopor	1. peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 2. Kepedulian pelestarian hasil pembangunan.	Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan, Tidak Berperan,
	Modernistator	1. Kejelasan visi dan misi 2. Pengelolaan SDM dan SDA	Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan, Tidak Berperan,

Sumber: Olahan peneliti 2020

2.5 Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan peran kepala desa Rawang Oguang Kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singingi dalam pemberdayaan masyarakat maka dilakukan teknik pengukuran sebagai berikut :

- a. Berperan : Jika ke empat indikator terpebuhi,
- b. Cukup berperan : Jika sebagian besar atau 3 indikator terpenuhi,
- c. Kurang berperan : Jika hanya 2 indikator yang terpebuhi,
- d. Tidak berperan : Jika hanya 1 atau 0 indikator yang terpenihu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3), dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000: 97). Informan dalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa Rawang Oguang, untuk menentukan informan tersebut untuk aparatur pemerintah desa peneliti memilih teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, (2015:9) *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel sumber data secara sengaja dan dengan segala pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu misalnya orang tersebut yang dianggap mengetahui tentang apa yang kita harapkan atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajah objek/situasi sosial yang akan diteliti. Dengan demikian untuk perangkat desa yang dijadikan informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang.

Sedangkan untuk menentukan informan dari masyarakat peneliti memilih teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono(2015, 219) *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya hanya sedikit, lama – lama akan semakin besar. Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapat dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Bedasarkan wawancara peneliti dilapangan jumlah informan dari masyarakat yang dapat di wawancarai dan dapat memenuhi kebutuhan mengenai

permasalahan maka di tetapkan jumlah informan dari masyarakat sebanyak 10 orang. Berikut peneliti sajikan jumlah informan dalam penelitian ini:

Tabel III.1: (Informan Penelitian Tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang)

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Kepala Urusan Umum	1 orang
4	Kepala Urusan Pembangunan	1 orang
5	Masyarakat	10 orang
Jumlah		14 orang

Sumber : Olahan Data Penelitian 2020

3.3 Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder data tersebut sebagai berikut:

- 3.1.1 Data pimer yaitu data utama yang diperoleh melalui informan penelitian yang telah ditetapkan meliputi data pemamfaatan kantor desa sebagai tempat pelayanan administrasi pemerintahan desa.
- 3.1.2 Data sekunder yaitu data pelengkap yang meliputi dokumen– dokumen administrasi yang dimiliki desa.

3.4 Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitan yang sedang dilakukan agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitan. Fokus penelitian diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi.

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi hasil observasi dan analisa hasil penelitian akan lebih terarah

Penelitian ini difokuskan pada peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

3.5 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tempat penulis melakukan Penelitian ini adalah di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik sebagai berikut:

3.6.1 Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan guna mengetahui gambaran umum desa Rawang Oguang.

3.6.2 Wawancara adalah kegiatan dialog langsung secara lisan dengan kepala desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang guna melengkapi data penelitian dengan mempedomani daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga sangat berguna sebagai penambah data penelitian.

Adapun alasan penulis melakukan berbagai cara pengumpulan data sebagaimana penulis jelaskan diatas, agar penulis dapat mengumpulkan data yang lebih baik. Dengan melihat, mendengar, dan membaca maka penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang membelatar belakangi penulis menggunakan berbagai cara mengumpulkan data sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman dalam sugiyono (2015:243) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum

yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339). Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Seperti yang dikemukakan semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Sugiyono (2015:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

3.7.2 Penyajian data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:249) dengan melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah digolongkan kedalam pola – pola hubungan interaktif agar lebih mudah dipahami pengguna laporan penelitian. Penyajian data dapat berupa teks naratif,

gambar, tabel dan bagan. Penyajian data tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara di lapangan terhadap informasi yang menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi nbisa juga tidak karena masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

3.8 Jadwal kegiatan penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang optimalisasi pemamfaatan kantor desa sebagai tempat pelayanan administrasi pemerintahan desa di desa rawang oguang kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singing sebgai berikut:

Tabel III.2 :Jadwal kegiatan penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

N o	Jenis Kegiatan	TAHUN 2019/2020												
		BULAN												
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengajuan judul proposal	X												
2	SK pembimbing		X											
3	Bimbingan dan konsultasi proposal			X	X	X	X							
4	Acc pembimbing							X						
5	Seminar proposal								X					
6	Perbaikan dan revisi proposal								X					
7	Pengolahan dan analisis data								X	X	X			
8	Konsultasi bimbingan skripsi										X	X		
9	Sidang skripsi											X	X	X

Sumber :Modifikasi Peneliti, 2020.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Rawang Oguang

Dinamakan Rawang Oguang yaitu diambil dari sebuah kisah dimana di sebuah rawa tepat pada jembatan penghubung desa tersebut. Rawa tersebut dialiri sungai yang cukup dalam, dan di rawang itu ada sebuah pohon besar yang berumur cukup tua, konon katanya dibawah pohon tua itu ada sebuah makhluk seperti gong besar yang hanya berbunyi sekali–kali dan bunyinya hampir menyerupai bunyi alat musik gong. Maka masyarakat menamai desa tersebut dengan desa rawang oguang.

Desa Rawang Oguang adalah desa pemekaran yang awalnya desa sungai sorik, kecamatan kuantan hilir seberang, kabupaten kuantan singingi. Awalnya desa ini adalah dusun III Desa Sungai Sorik, jumlah penduduk awalnya sebanyak 1454 jiwa dengan 166 KK. Seiring berjalannya waktu, Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2012 Desa Sungai Sorik dimekarkan sehingga menjadi desa baru namanya Desa Rawang Oguang.

Pada tahun 2012/2013 kepala Desa dijabat oleh M.Nur sebagai PLT kepala desa selama 1 tahun, pada tahun 2013 barulah menjadi desa dirintip, dan dinamakan desa Rawang Oguang. Dan pada tahun itu juga diadakan pemilihan kepala desa dan dipercaya menjadi kepala desa yaitu Syafis dan sebagai sekdes yaitu M.Nur. kepemimpinan Syafis berakhir pada tahun 2019 dan Sekarang Desa Rawang Oguang di pimpin Dedi.

Desa Rawang Oguang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan mayoritas penduduk asli desa yang mempunyai beberapa suku. Seperti, suku tigo kampung, suku limo kampung, suku cermin, dan suku melayu. Dan setiap suku dikepalai oleh kepala suku yang disebut sebagai ninik mamak, dimana ninik mamak sangat berperan di desa sebagai menyelesaikan permasalahan terutama permasalahan suku di desa.

4.2 Keadaan Geografis

Desa Rawang Oguang berada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan ibukota kecamatan Koto Rajo. Desa Rawang Oguang merupakan desa yang paling ujung bagian selatan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Adapun batas-batas wilayah di desa rawang oguang kecamatan kuantan hilir seberang antara lain:

3. Sebelah utara berbatasan dengan desa Sungai Sorik
4. Sebalah selatan berbatasan dengan desa Punti Kayu Pematang Peranap.
5. Sebelah barat berbatasan dengan desa Teratak Jering.
6. Sebelah timur berbatasan dengan desa Pulau Beralo dan Petai Inuman.

Desa Rawang Oguang memiliki luas wilayah 175 Ha. Untuk melihat pembagian wilayah Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1: Pembagian luas wilayah Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

No	Wilayah	Luas wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	40	23 %
2	Pertanian sawah	45	26 %
3	Ladang / tegalan	50	28 %
4	Perkantoran	0.25	0,1 %
5	Sekolah	0.25	0,1 %
6	Jalan	40	23 %
Jumlah		175	100%

Sumber : RPJM Desa Rawang Oguang, tahun 2016

Desa Rawang Oguang merupakan desa paling ujung yang memiliki jarak yang cukup dekat dengan ibukota kecamatan yaitu 3,2 KM atau dapat ditempuh selama 15 menit, sedangkan untuk jarak ke ibukota kabupaten yaitu sekitar $\pm$ 1 jam perjalanan. Desa Rawang Oguang memiliki 3 (tiga) dusun yaitu dusun I, dusun II, dusun III, yang setiap dusun mempunyai pemimpin yang disebut kapala dusun (Kadus). Dan setiap dusun terdapat 2 (dua) RT, dan memiliki 3 (tiga) RW.

4.3 Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah 714 jiwa yang terdiri dari 356 laki dan 358 perempuan. Dan jumlah kepala keluarga yaitu 214 KK. Untuk mengetahui jumlah penduduk desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2: Jumlah penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Dusun	Jiwa	Persentase (%)
1	Dusun I	224	31 %
2	Dusun II	235	33 %
3	Dusun III	255	36 %
Jumlah		714	100 %

Sumber : Olahan data penelitian 2020

Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di dusun III lebih banyak dari dusun I, dan dusun II yaitu sebanyak 36%, sedangkan di dusun I sebanyak 31% dan di dusun II sebanyak 33%.

Untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.3: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

No	Dusun	Jenis kelamin		Jiwa	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Dusun I	110	114	224	31 %
2	Dusun II	114	121	235	33 %
3	Dusun III	132	123	255	36 %
Jumlah		356	358	714	100%

Sumber : Olahan data penelitian 2020

Sedangkan untuk melihat jumlah penduduk desa Rawang Oguang berdasarkan kelompok golongan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4 : Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

No	Kelompok usia	Jenis kelamin		Jiwa	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Dibawah 1 tahun	39 jiwa	56 jiwa	95 jiwa	13,31 %
2	1 - 5 tahun	48 jiwa	47 jiwa	95 jiwa	13,31 %
3	6 - 14 tahun	47 jiwa	58 jiwa	105 jiwa	14,71 %
4	15 – 44 tahun	87 jiwa	62 jiwa	149 jiwa	20,87 %
5	45 – 64 tahun	65 jiwa	67 jiwa	132 jiwa	18,49 %
6	64 tahun keatas	70 jiwa	68 jiwa	138 jiwa	19,33 %
Jumlah		356 jiwa	358 jiwa	714 jiwa	100 %

Sumber : Olahan data penelitian 2020

Selanjutnya selain kelompok usia yang beragam, tingkat pendidikan di Desa Rawang Oguang juga beragam. Dari berbagai kelompok tingkatan pendidikan penduduk desa Rawang Oguang, yang paling banyak adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) yang kemudian disusul oleh tamatan SMP.

Untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5 : Jumlah penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak tamat SD	112 jiwa	16 %
2	Tamat SD	236 jiwa	33 %
3	Tamat SMP	150 jiwa	21 %
4	Tamat SMA	126 jiwa	18 %
5	Tamat Perguruan Tinggi	25 jiwa	4 %
6	Belum sekolah	75 jiwa	11 %
Jumlah		714 jiwa	100%

Sumber data : Olahan data penelitian 2020

4.4 Sarana dan Prasarana Desa

Sebagai sebuah desa yang menjalankan kehidupan social dan pemerintahan layaknya desa-desa lain, Desa Rawang Oguang memiliki beberapa sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya kehidupan sosial masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan harapan. Sarana dan prasarana tersebut seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana kesehatan, kantor desa, balai desa dan lainnya.

Untuk lebih jelas mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang padat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6: Sarana dan prasarana Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Total
1	Sarana pendidikan : - TK / PAUD	1 Unit	1 Unit
2	Tempat Ibadah: - Masjid - Mushallah	1 Unit 3 Unit	4 Unit
3	Sarana Olahraga - lapangan volley	1 Unit	1 Unit
4	Kantor desa	1 Unit	1 Unit
5	Balai desa	1 Unit	1 Unit
6	Sarana kesehatan - Puskesmas	1 Unit	1 Unit
Jumlah		9 Unit	9 Unit

Sumber : Olahan data penelitian 2020

4.5 Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa

Perekonomian masyarakat tentunya merupakan tolak ukur dari kemakmuran suatu wilayah. Sedangkan pekerjaan masyarakat merupakan bagian yang tidak lepas dari perekonomian. Hal ini dikarenakan hasil dari pekerjaan masyarakatlah yang menentukan perekonomian masyarakat tersebut.

Adapun pekerjaan masyarakat Desa Rawang Oguang sebagian besar adalah sebagai petani karet, sedangkan sebagian lainnya terbagi kedalam beberapa jenis pekerjaan seperti, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, perkebunan, wiraswasta, TNI/Polri, tukang, dan pensiunan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kondisi perekonomian masyarakat desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang berdasarkan pekerjaannya, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.7 : Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan masyarakat di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani karet	473	66 %
2	Pedagang	145	20 %
3	PNS	2	0 %
4	TNI.Polri	1	0 %
5	Wiraswasta	75	11 %
6	Tukang	1	0 %
7	Pensiunan	1	0 %
8	Guru	6	1 %
9	Buruh	10	1 %
Jumlah		714 jiwa	100%

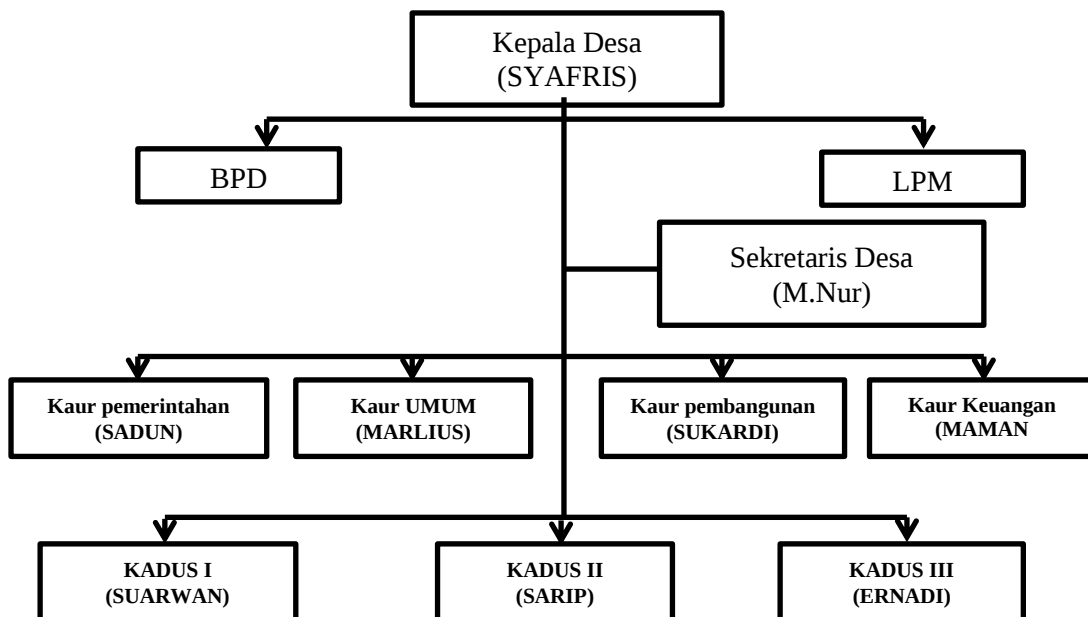
Sumber : Olahan data penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan sebagian besar penduduk Desa Rawang Oguang adalah petani karet yaitu sebesar 66%, dan selanjutnya yaitu pedagang sebesar 20%.

4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rawang Oguang

Berdasarkan peraturan yang ada terkait dengan desa yaitu Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanahkan bahwa kepala desa memiliki perangkat desa yang membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam peraturan tersebut, dikatakan bahwa kepala desa sebagai kepala pemerintahan Desa Rawang Oguang berwenang menetapkan perangkat desa. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuatan Singingi adalah seperti gambar berikut:

Gambar IV.1: **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuatan Singingi Periode 2014-2019.**



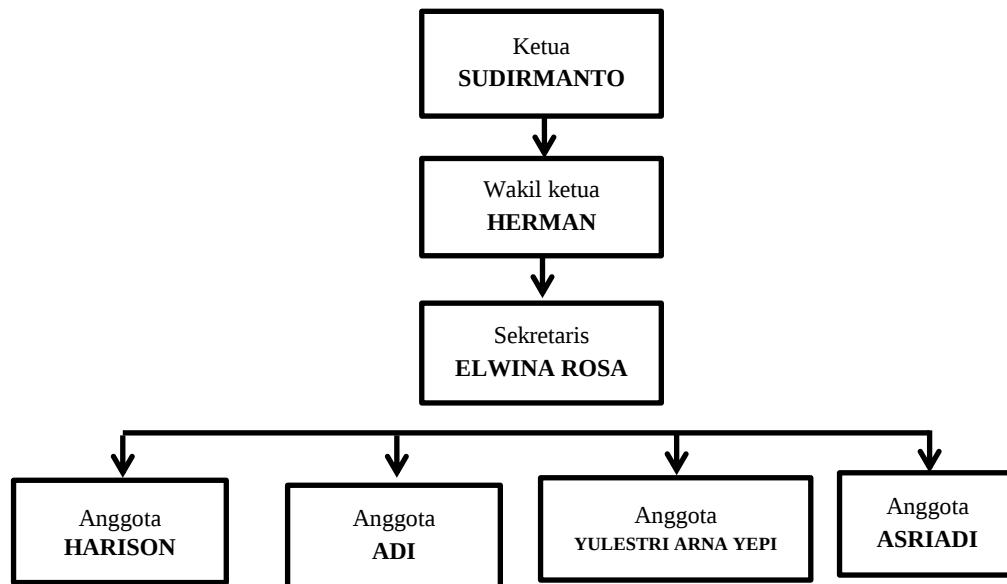
Sumber : *Kantor Desa Rawang Oguang, 2020*

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintahan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

1. Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu kepala desa juga memiliki wewenang, hak, kewajiban dan larangan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada.
2. Perangkat desa memiliki tugas dan fungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada kepala desa, selain itu perangkat desa juga memiliki larangan yang harus dipatuhi.

Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan tugas pemerintah di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, pemerintah desa juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk mengetahui struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Rawang Oguang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar IV.2 : Gambar Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Periode 2014-2019



Sumber : *Struktur organisasi BPD Desa Rawang Oguang kecamatan kuantan hilir seberang 2020*

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu Anggota BPD memiliki tugas dan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga memiliki larangan yang harus dipatuhi dengan konsekuensi pemberian sanksi administrasi yang sudah ditentukan di dalam undang-undang yang ada.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, terkadang muncul pertanyaan dalam benak pembaca tentang identitas informan. Pertanyaan tentang Identitas informan penelitian sangatlah wajar. Maka pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangatlah penting dijelaskan identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang optimalisasi pemanfaatan kantor desa sebagai tempat pelayanan administrasi desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Adapun identitas informan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.1.1 Informan Menurut Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini di akibatkan oleh pemahaman masyarakat dilokasi penelitian terkait dengan masalah yang terjadi memang dimiliki oleh kaum laki-laki. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini sangatlah mencolok. Untuk melihat lebih jelasnya informan berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Jumlah Informan Dalam Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki –laki	9	64 %
2	Perempuan	5	36 %
Jumlah		14	100 %

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah informan penelitian optimalisasi pemanfaatan kantor desa sebagai tempat pelayanan administrasi desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi di dominasi oleh laki – laki yaitu berjumlah 9 orang (64 %) sedangkan informan perempuan hanya berjumlah 5 orang (36%).

5.1.2 Informan Berdasarkan Tingkatan Umur

Sebuah penelitian tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat kebergaman usia informannya, mulai dari yang termuda yaitu 30 tahun sampai yang paling tua yaitu 60 tahun, untuk mengetahui jumlah informan berdasarkan tingkatan umur informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.2 : Jumlah Informan Dalam Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Tingkatan Umur.

No	Kelompok umur	Jumlah	Persentase (%)
1	30 – 39	3	21 %
2	40 – 49	6	43 %
3	50 – 59	3	21 %
4	60	2	14 %
Jumlah		14	100 %

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2020

Bersadarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah informan berdasarkan tingkatan umur yang terbanyak yaitu pada umur 40-49 tahun yang berjumlah 6 orang (43%) , sedangkan yang paling sedikit yaitu umur 60 tahun yang berjumlah 2 orang (14%).

5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam penelitian ini tingkatan pendidikan informan cukup bervariasi mulai dari mereka yang tamatan Sekolah Dasar (SD) sampai tamatan perguruan tinggi. Untuk melihat jumlah informan berdasarkan tingkatan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Jumlah Informan Dalam Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Tingkatan Pendidikan.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	2	14
2	SMP	3	21
3	SMA	4	29
4	Perguruan Tinggi	5	36
Jumlah		14	100 %

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2020

Berdasarkan table V.3 diatas diketahui bahwa dari 14 orang informan sebagian besar tingkat pendidikan yang lebih dominan dalam penelitian ini adalah tamatan perguruan tinggi yaitu sebanyak 5 orang dengan pesentase 36% sedangkan pada tingkat berikutnya adalah tamatan SMA yaitu sebanyak 4 orang dengan pesentase 29%, dan tingkat selanjutnya adalah SMP sebanyak 3 orang dengan persentase 21%, dan tingkat terakhir tamatan SD yaitu sebanyak 2 orang dengan pesentase 14%.

5.1.4 Informan Berdasarkan Jabatan

Dari hasil wawancara dilapangan kepada informan di Desa Rawang Oguang dikelompokkan identitas informan berdasarkan jabatan sebagai berikut :

Tabel V.4 : Jumlah Informan Dalam Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Jabatan.

No	Tingkat Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	7 %
2	Sekretaris Desa	1	7 %
3	Kepala Urusan Umum	1	7 %
4	Kepala Urusan Pembangunan	1	7 %
5	Masyarakat	10	71 %
Jumlah		14	100 %

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel diatas dengan jumlah 14 orang dengan berbagai jenis jabatan yang dijadikan peneliti untuk meminta informasi terkait dengan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang diantaranya kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan umum, ketua BPD , dan masyarakat.

5.2 Hasil dan pembahasan penelitian peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan indikator yang dijadikan landasan atau pedoman dalam penilaian terhadap penelitian mengenai peran kepala dalam program pemberdayaan masyarakat desa menurut Siagian (2014;142) maka akan di paparkan hasil penelitian yang akan melihat peran kepala desa dalam pemberdayan masyarakat desa di Desa Rawang Oguang dari hasil wawancara peneliti dari setiap point pertanyaan sesuai dengan indikator yang ada dibawah ini:

5.2.1 Peran Stabilistator

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan yang peneliti lakukan dengan bapak kepala desa sebagai informan pertama mengenai peran stabilistator dengan pertanyaan yaitu *“apa yang bapak lakukan dalam menstabilkan perekonomian desa?”*. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan pertama.

“Dalam menstabilkan perekonomian desa, kami selaku pemerintahan selalu berupaya melakukan hal-hal yang dapat menstabilkan perekonomian desa kami, seperti adanya simpan pinjam khusus perempuan melalui program PNPMDesa, dimana simpan pinjam dikelola oleh ibu –ibuk dengan tujuan program tersebut yaitu dapat membantu masyarakat dalam modal untuk usaha pribadi, selain itu kami juga berupaya untuk mengadakan program bantuan ternak sapi”.

(wawancara dengan kepala desa Rawang Oguang, tanggal 6Agustus 2020, 14.15 WIB)

Dari pemaparan kepala desa di ketahui bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pemerintahan desa beberapa kegiatan yaitu diantaranya simpan pinjam perempuan dimana simpan pinjam ini dikhususkan untuk perempuan untuk membantu dalam membuka usaha yang mereka lakukan. selain

itu pemerintahan desa juga memberikan bantuan ternak untuk setiap masyarakat dengan pemberian bergulir dengan maksud untuk membantu perekonomian masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan perangkat desa lainnya yaitu sekeretaris desa sebagai informan kedua dengan mengajukan pertanyaan *“Menurut anda bagaimakah peran kepala desa dalam menstabilkan perekonomian desa?”* berikut hasil kutipan wawancara:

“Menurut saya kepala desa dalam menstabilkan perekonomian desa belum cukup berperan, karena selama ini belum ada kegiatan ataupun program desa yang memberikan perubahan terhadap perekonomian, memang benar sudah ada program yang dijalankan namun menurut saya itu belum cukup, saya berharap pemerintah desa kedepan lebih memperhatikan keadaan desa ,”

(wawancara dengan sekretaris desa Rawang Oguang, tanggal 6 Agustus 2020, 14.30 WIB)

Dari pemaparan sekretaris desa diketahui bahwa program yang ada didesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dinilai masih belum bisa merubah perekonomian masyarakat, sehingga sampai saat ini perekonomian masih belum stabil.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu bapak Yusri selaku informan ketiga yang peneliti temui dikediamannya, berikut kutipan hasil wawancara”

“Sejauh ini kepala desa belum belum berperan,karena kepala desa tidak terlalu memperhatikan dan tidak peduli dengan apa yang terjadi, kami melihat kepala desa hanya sibuk sendiri, dan program desa pun banyak yg tidak kami ketahui.”

(wawancara dengan Yusri, tanggal 6 Agustus 2020, 14.45 WIB)

Dan jika dilihat dari pemaparan bapak Yusri diketahui bahwa kepala desa dinilai belum berperan dalam meningkatkan perekonomian, kurangnya perhatian

pemerintah desa dengan situasi dan keadaan desa sehingga banyak program desa yang tidak diketahui.

Jawaban yang tidak jauh berbeda peneliti dapat dari wawancara dengan masyarakat lainnya yaitu bapak Erman yang peneliti temui dikediaman beliau di dusun II RT 003, berikut kutipan hasil wawancara :

“saya melihat kepala desa belum menunjukkan perannya sebagai kepala desa sekaligus dalam menstabilkan perekonomian karena selama ini kepala kami melihat kegiatan yang beliau lakukan seperti tidak terarah”.
(wawancara dengan Erman, tanggal 6 Agustus 2020, 14.50 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan peneliti mendapatkan bahwa kepala desa dalam menstabilkan perekonomian masih terbilang kurang berperan karena kurangnya perhatian kepala desa dengan keadaan dan tidak adanya tindakan lanjut dalam masalah perekonomian desa. Selain itu kurangnya sosialisasi program desa sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa pada indikator yang pertama yaitu peran stabilisator pada pertanyaan pertama adalah **tidak berperan.**

Selanjutnya masuk pada pertanyaan kedua yaitu “ *bagaimanakah peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa?*” berikut hasil kutipan wawancara peneliti dengan bapak kepala desa :

“Terkait kesejahteraan sosial masyarakat kami melihat sulit untuk ditingkatkan hal disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah, namun walaupun demikian saya melihat banyak potensi yang dimiliki masyarakat yang dapat dikembangkan yang selama ini belum tersalurkan, memang selama ini belum ada kami lakukan pelatihan – pelatihan tertentu namun kami berupaya memotivasi masyarakat untuk meningkatkan potensi – potensi yang ada.”

(wawancara dengan kepala desa Rawang Ogung, tanggal 6 Agustus 2020, 14.17 WIB)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala desa diketahui bahwa Kepala Desa belum pernah memberikan suatu pelatihan terhadap masyarakat tetapi hanya memberikan suatu motivasi atau wawasan terhadap masyarakat memanfaatkan segala potensi yang ada dilingkungan. Sehingga tidak ada peningkatan kualitas dan wawasan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kedua pada indikator pertama kepada masyarakat, berikut kutipan hasil wawancara:

“Dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial bagi kami selaku masyarakat merasakan masih jauh dari kata sejahtera dimana selama desa ini berdiri sendiri belum pernah kami mendapatkan pelatihan-pelatihan apapun untuk dapat memotivasi ataupun mengembangkan potensi yang ada, kami sangat setuju jika pemerintah desa mengadakan suatu pelatihan yang dapat kami gunakan untuk meningkatkan ekonomi kami.”

(wawancara dengan Yusri, tanggal 6 Agustus 2020, 14.35 WIB)

Dan jawaban yang tidak jauh berbeda peneliti dapat dari masyarakat lainnya yaitu bapak Erman berikut kutipan hasil wawancaranya:

“ya, sama-sama kita ketahui dengan melihat keadaan yang sekarang ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kepala desa memang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
(wawancara dengan Erman, tanggal 6 Agustus 2020, 14.17 WIB)

Dari hasil wawancara dengan bapak Erman dapat diketahui bahwa kepala desa belum berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat masih jauh dari sejahtera.

Selanjutnya untuk lebih memastikan bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan ketua BPD yaitu bapak Sudirman, berikut kutipan hasil wawancaranya:

“Sulit juga untuk dijelaskan, kita berpedoman saja pada keadaan yang sekarang, dengan ekonomi yang sebelumnya sampai sekarang belum ada perubahan apalagi peningkatan, berarti sama-sama kita tahu bahwa kepala desa memang belum berperan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
(wawancara dengan Bapak Sudirman, tanggal 6 Agustus 2020, 15.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat seperti melaksanakan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan potensi desa yang ada pemerintah tidak pernah mengadakan pelatihan apapun padahal masyarakat sangat menginginkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi yang ada. Berdasarkan pemaparan informan kepada peneliti menunjukan dengan jelas bahwa untuk memberikan pelatihan responden mengatakan **tidak berperan**.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan dengan kedua pertanyaan pada indikator pertama dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa

sebagai stabilisator dinyatakan **tidak berperan**, dimana kurangnya perhatian kepala desa dengan keadaan dan tidak adanya tindakan lanjut dalam masalah perekonomian desa. Selain itu kurangnya sosialisasi program desa sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Tidak adanya pelatihan dalam meningkatkan keahlian dan wawasan masyarakat sehingga keahlian tidak berkembang.

5.2.2 Peran Inovator

Sebagai inovator, berarti Kepala Desa secara keseluruhan bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan. Inovatif mencakup pengembangan gagasan baru, pemikiran baru dan mengembangkan serta menerapkan gagasan baru tersebut dalam pekerjaan.

Untuk mengetahui peran kepala desa pada indikator inovator ini peneliti melakukan wawancara dengan informan ke dua yaitu bapak Rafles dengan pertanyaan pertama yaitu *“Menurut anda bagaimakah peran kepala desa dalam pengambilan keputusan sekaligus sebagai pelaksana keputusan?”*, Berikut kutipan hasil wawancara:

“Dalam pemecahan masalah yang dihadapi kepala desa selalu memiliki ide atau cara tersendiri, menurut kami beliau bisa dijadikan sumber ide atau gagasan dalam pembangunan desa. karena selalu memiliki pemikiran yang inovatif.” (wawancara dengan Bapak Rafles selaku sekretaris desa, tanggal 6 Agustus 2020, 14.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kepala desa memiliki cara tersendiri dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Tidak terpaku kepada

pemikiran lama tetapi selalu ide baru yang logis dan dapat diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan ketiga yaitu bapak Sudirmanto selaku ketua BPD Rawang Oguang, berikut kutipan hasil wawancara:

“ya, menurut saya beliau selalu punya solusi yang tepat dalam menangani masalah, memiliki pemikiran jauh kedepan untuk pembangunan desa ini, tapi sayangnya belum ada terealisasi”.

(wawancara dengan Ketua BPD, tanggal 6 Agustus 2020, 14.52 WIB)

Jawaban yang tidak jauh berbeda juga di paparkan oleh masyarakat setempat, yaitu bapak Yusri. Berikut kutipan hasil wawancara :

“Menurut saya kepala desa bisa dijadikan sumber ide dalam pemecahan masalah maupu pengabilan keputusan krena keputusan yang diambil selalu masuk akal”.

(wawancara dengan Bapak Yusri, tanggal 6 Agustus 2020, 15.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kepala desa secara keseluruhan bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan juga mendorong masyarakat sehingga dapat bekerja secara aktif dalam pembangunan. Maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala dalam indikator innovator pada pertanyaan pertama yaitu **berperan**.

Selanjutnya peneliti lanjut melakukan wawancara pada pertanyaan kedua yaitu *“Bagaimanakah menurut anda peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan?”*. Berikut hasil wawancara dengan bapak Ketua BPD :

“Menurut saya untuk menyelesaikan masalah kepala desa termasuk orang yang teliti karena selalu menganalisa terlebih dahulu permasalahan nya

dimana, setelah itu selalu merembukkan permasalahan dan mencari solusi secara bersama”.

(wawancara dengan Ketua BPD, tanggal 6 Agustus 2020, 14.55 WIB)

Pada pemaparan dari bapak ketua BPD diketahui bahwa kepala desa orang yang memiliki pemikiran yang inovatif dimana dalam penyelesaian masalah tidak mengambil keputusan sendiri tetapi melakukan analisa terhadap masalah yang dihadapi dan membicarakan secara bersama permasalahan dengan bawahan untuk menemukan solusi atau jalan keluar yang logis dan dapat diterima masyarakat.

Jawaban yang sama juga di sampaikan oleh sekretaris desa, berikut kutipan hasil wawancara:

“Kepala desa selalu memberikan solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah, tidak hanya dengan cara sendiri tetapi selalu membicarakan secara bersama untuk menemukan jalan keluar permasalahan”.

(wawancara dengan sekretaris desa, tanggal 6 Agustus 2020, 15.10 WIB)

Dari wawancara dengan sekretaris desa diketahui kepala desa sudah berperan dalam hal pemecahan permasalahan, dimana selalu mencari solusi secara bersama dengan perangkat lainnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu bapak Yusri, berikut kutipan hasil wawancara :

“Cukup baik, kalo memang ada permasalahan beliau selalu merembukkan dengan perangkat lainnya, tidak mengambil keputusan sendiri”.

(wawancara dengan Yusri, tanggal 6 Agustus 2020, 15.15 WIB)

Untuk lebih memastikan bagaimana peran kepala desa dalam pemecahan masalah, peneliti lanjut melakukan wawancara dengan masyarakat lainnya yaitu bapak Erman, berikut kutipan hasil wawancara:

“Menurut pandangan saya beliau cukup baik dalam penanganan masalah, bukan hanya memikirkan mencari solusi tetapi juga berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik bersama rekan-rekan nya”.

(wawancara dengan Erman, tanggal 6 Agustus 2020, 15.18 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti disimpulkan bahwa dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi Kepala Desa terlebih dahulu meneliti dan mendiagnosis sumber-sumber atau sebab timbulnya suatu permasalahan dan memecahkan masalah atau mencari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio yang cara kerja lebih sederhana, efektif dan efisien namun mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa pada indikator innovator adalah **berperan**.

5.2.3 Peran Pelopor

Sebagai pelopor Kepala Desa harus mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam proses pembangunan, juga harus dapat memberikan contoh tentang daya gerak dan kemampuan kerja yang lebih cepat sehingga masyarakat dapat terpengaruh, tentunya peranan tersebut dijalankan secara efektif sehingga nantinya masyarakat relatif mudah merubah pandangan persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara kerjanya sehingga memperlancar jalannya roda pembangunan.

Untuk mengetahui peran kepala desa dalam peran pelopor, peneliti melakukan wawancara dengan informan kedua yaitu bapak Rafles dengan pertanyaan *”Menurut anda bagaimakah peran kepala dalam pemberian contoh untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan?”*, berikut kutipan hasil wawancara:

“Kalau dalam menyelesaikan pekerjaan desa ,kepala desa banyak hal yang beliau ajarkan karna memang beliau memiliki banyak pengetahuan dari kami, sehingga dari yang tidak kami ketahui jadi kami ketahui, namun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal meningkatkan sumberdaya manusianya mungkin jarang”.
(wawancara dengan Sekretaris Desa, tanggal 6 Agustus 2020, 14.25 WIB)

Berdasarkan paparan dari sekretaris desa diketahui kepala desa hanya berbagi pengalaman dengan perangkat desa lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan desa, namun hal ini jarang dilakukan terhadap masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu bapak Yusri, berikut kutipan hasil wawancara:

“Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan secara langsung saya rasa belum ada, tetapi beliau hanya memberikan motivasi yang disampaikan pada acara tertentu di desa.”
(wawancara dengan Bapak Yusri, tanggal 6 Agustus 2020, 14.55 WIB)

Dari hasil wawancara diketahui bahwa kepala desa belum pernah memberikan contoh secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi kepala desa hanya berperan memberikan kata motivasi yang disampaikan dalam acara tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti maka peran kepala desa dalam indikator ketiga yaitu indikator pelopor adalah **tidak berperan**. Hal ini dilihat dari pemerintah tidak pernah mengadakan pelatihan apapun padahal masyarakat sangat menginginkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi yang ada, dan kepala desa belum pernah memberikan contoh secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi kepala desa hanya berperan memberikan kata motivasi yang disampaikan dalam acara tertentu.

5.2.4 Peran Modernistator

Dalam peranan selaku modernisator, seorang kepala desa diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama. Seorang kepala desa harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi pola pemikiran modern untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicita-citakan. Kepala desa selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan program pembangunan didesanya di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian rakyat.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan pada pertanyaan pertama dari indikator modernistator dengan informan pertama yaitu bapak kepala desa dengan pertanyaan *“Bagaimanakah visi bapak dalam pembangunan desa?”*, berikut hasil kutipan wawancaranya:

“Selaku pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan tentu memiliki visi demi membangun dan perubahan desa, dan visi tersebut yang menjadi target kerja kami.”

(wawancara dengan kepala desa, tanggal 6 Agustus 2020, 14.24 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala desa diketahui kepala desa memiliki visi yang telah di susun bersama perangkat lainnya, yang merupakan target kerja pemerintah desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat setempat yaitu dengan bapak Yusri selaku informan ke empat. Peneliti mengajukan pertanyaan *“apakah kepala desa memiliki visi yang jelas dalam pembangunan desa?”*, berikut hasil kutipan wawancaranya:

“Mengetahui visi kepala desa kami belum mengetahui secara jelas visi dari pemerintah, karena selama ini belum ada sosialisasi dalam bentuk apapun terhadap masyarakat mengenai visi ataupun target kerja pemerintah desa.”
(wawancara dengan Yusri, tanggal 6 Agustus 2020, 15.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat diketahui bahwa masyarakat belum mengetahui mengenai visi dari pemerintahan dalam pembangunan desa, dan sosialisasi dalam bentuk apapun tidak pernah diadakan sehingga masyarakat buta akan visi desa mereka sendiri.

Jawaban yang hampir sama peneliti dapat dari bapak Sudirmanto selaku ketua BPD sekaligus sebagai informan ke tiga, berikut kutipan hasil wawancara:

“Mengetahui visi desa tentu ada, namun sepertinya visi tersebut hanya menjadi acuan kerja pemerintah desa, kalau ditanya kepada masyarakat tentu mereka tidak tahu karena memang sosialisasi visi dan misi desa belum pernah kita lakukan.”
(wawancara dengan Ketua BPD, tanggal 6 Agustus 2020, 14.58 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang ada dapat diketahui bahwa kepala desa sudah memiliki visi dalam membangun desa, namun masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai visi dan misi desa karena belum ada sosialisasi mengenai visi dan misi tersebut dari pemerintahan desa.

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan dengan jelas bahwa kepala desa sudah memiliki visi dalam pembangunan desa, namun visi tersebut tidak tersampaikan secara jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat setempat tidak mengetahui visi dan misi desa. Maka **pertanyaan pertama** dari **indikator ke empat** yaitu indikator modernistator adalah **tidak berperan**.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk pertanyaan kedua dari indikator modernistator yaitu *“Menurut anda Bagaimanakah peran kepala desa dalam mengolah SDM maupun kekayaan alam yang dimiliki desa?”. Wawancara peneliti lakukan dengan ketua BPD, berikut hasil kutipan wawancaranya:*

“pengelolaan SDM kalo menurut saya belum terealisasi, begitu juga dengan SDA nya, karena program kerja pemerintah desa masih terfokus dengan masalah bantuan dana yang terdampak akibat corona”
(wawancara dengan Ketua BPD, tanggal 6 Agustus 2020, 14.60 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kepala desa belum ada upaya dalam mengembangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam karena masih terfokus dengan program bantuan untuk masyarakat yang terdampak akibat corona.

Jawaban yang hampir sama peneliti dapat dari hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu bapak Yusri, beliau mengatakan bahwa:

“selama ini belum ada bentuk upaya untuk mengelola SDA dan SDM, dapat dilihat masyarakat masih segitu-gitu aja, begitu juga potensi desa belum ada peningkatan dalam pengolahannya, semoga kedepan desa lebih baik.”
(wawancara dengan Yusri, tanggal 6 Agustus 2020, 15.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat kita ketahui bahwa kepala desa belum ada upaya untuk meningkatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, sehingga belum ada peningkatan nilai tambah dari hasil sumberdaya alam yang dimiliki dan belum ada peningkatan keterampilan dari masyarakat. Maka, dapat diketahui dengan jelas bahwa untuk mengembangkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia **tidak berperan**.

Pada indikator ke empat yaitu peran modernistator melalui wawancara peneliti dengan informan dengan mengajukan dua pertanyaan peneliti

mendapatkan jawaban tidak baik, maka dapat disimpulkan indikator keempat pada peran modernistator **tidak berperan**, hal ini terbukti belum ada upaya dari kepala desa untuk meningkatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, sehingga belum ada peningkatan nilai tambah dari hasil sumberdaya alam yang di miliki dan belum ada peningkatan keterampilan dari masyarakat. Dengan tidak berkembangnya keterampilan yang ada maka tidak ada kemajuan yang dapat membantu perekonomian masyarakat.

Pada keterangan hasil wawancara kepada informan diatas dapat dilihat dan simpulkan jawaban informan tentang peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang seperti pada tabel berikut:

Table VI.1 :Tabel Hasil Wawancara Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

No	Indikator	Hasil wawancara			
		Berperan	Cukup berperan	Kurang berperan	Tidak berperan
1	Stabilistator				√
2	Pelopor				√
3	Innovator	√			
4	Modernistator				√

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator yang menjadi penilaian pada variabel ini menghasilkan tidak berperan untuk tiga indikator dari empat indikator yang ada. Tiga indikator yang mendapatkan jawaban tidak berperan

yaitu indikator stabilistator, pelopor dan indikator modernistator. Sedangkan satu indikator mendapatkan jawaban berperan yaitu pada indikator innovator.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah **tidak berperan**. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian kepala desa dengan keadaan dan tidak adanya tindakan lanjut dalam masalah perekonomian desa. Selain itu kurangnya sosialisasi program desa sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

Dalam hal meningkatkan keterampilan masyarakat pemerintah tidak pernah mengadakan pelatihan apapun padahal masyarakat sangat menginginkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi yang ada, kepala desa belum pernah memberikan contoh secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi kepala desa hanya berperan memberikan kata motivasi yang disampaikan dalam acara tertentu.

Selain itu dalam meningkatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, kepala desa belum ada upaya untuk meningkatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, sehingga belum ada peningkatan nilai tambah dari hasil sumberdaya alam yang di miliki dan belum ada peningkatan keterampilan dari masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa Peran Kepala Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dinilai tidak berperan.

6.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temui di lapangan, peneliti memberikan saran sebagai masukan terhadap Peran Kepala Desa Dalam program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yaitu:

1. Peningkatan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Rawang Oguang semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi Isbandi Rukmianto. (2002). *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ambar Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jurnal Pendidikan.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Edi Suharto. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS).
- Ernawati , 2016, “Pelaksanaan Pelayanan Di Kantor Camat Kuantan Hilir Sebereang Kabupaten Kuantan Singingi”. Skripsi. Pekan Baru: Fakultas ilmu Sosial, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Fitri Nurviyasari. (2012). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Belajar Program Keaksaraan Fungsional di PKBM Tanjungsari, Tanjungharjo, Nanggulan, Kulonprogo*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Julita, 2019,”Implementasi rencana kerja pembangunan Desa(RKPDESA) TAHUN 2017 Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Skripsi. Taluk Kuantan: Fakultas Ilmu Sosial, Uiversitas Islam Kuantan Singingi.
- Ginanjari Kartasasmita. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Gunawan Sumodiningrat. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1996). Jakarta: Gramedia.
- Michael P. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa:

Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Miles, B.B., dan A.M. Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. UI: Press Jakarta.

Nurhayati, 2019, "Optimalisasi Pemamfaatan Kantor Desa sebagai tempat pelayanan administrasi pemerintahan desa di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi", Skripsi. Taluk Kuantan: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Pratama, Putri Yulia, 2018, "Optimalisasi Pemamfaatan Kantor Kepala Desa Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuntan Mudik", Skripsi. Taluk Kuantan: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Raharjo Adisasmita. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ritonga, Orbusti,Saddam, 2015, "Analisis Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Di Desa Pir Trans Sosa IV Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawa Provinsi Sumatra Utara", Skripsi, Sumatra Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau.

Sarlito Sarwono. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sidik, Machfud. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah*. Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XX! STIA LAN, Bandung.

Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siagian,Sondang P.,(2014).*Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*,Alfabeta Bandung.

Sumardjono, Dardjo, Junuzal Junus. (1990/1991). *Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa & Kelurahan*. Jakarta: PT. Union Cipta Muda. Todaro,

Usman Sunyoto. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Widjaja, HAW., Prof. Drs. (2003). *Pemerintahan Desa/ Marg.*, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

B. Website

<https://www.materibelajar.id/2020/12/inilah-beberapa-definisipemberdayaan.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

<https://perbedaan.budisma.net/perbedaan-peran-dan-fungsi.html>, diakses pada tanggal 12 April 2020.

<https://pendidikan.co.id/pengertian-pemberdayaan-masyarakat>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020.

C. Undang – undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945

LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara Untuk
Informan Penelitian Desa
Rawang Oguang Kecamatan
Kuantan Hilir Seberang
Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR WAWANCARA

Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa
Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan
Singingi Periode 2014-2019

Pewawancara : Peneliti
Narasumber :
Jenis kelamin :
Umur :
Pendidikan :
Jabatan :
Tanggal wawancara :

PERTANYAAN

1. Peran Stabilistator

- a. Menurut anda bagaimakah peran kepala desa dalam menstabilkan perekonomian desa?

.....
.....

- b. Menurut anda bagaimakah peran kepala dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat(program pendidikan dan pelatihan)?

.....
.....

2. Indikator Inovator

- a. Menurut anda bagaimakah peran kepala desa dalam pengambilan keputusan sekaligus sebagai pelaksana keputusan ?

Jawaban

.....

- b. Bagaimanakah menurut anda bagaimana peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan?

.....

3. Peran Pelopor

- a. Menurut anda bagaimakah peran kepala dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat ?

.....

- b. Menurut anda bagaimakah peran kepala dalam kepedulian terhadap pelestarian hasil pembangunan ?

.....

4. Indikator Modernistator

- a. Menurut anda apakah kepala desa memiliki visi yang jelas dalam pembangunan desa?

.....

- b. Menurut anda Bagaimanakah peran kepala desa dalam mengolah kekayaan alam atau potensi yang dimiliki desa?

.....

.....

LAMPIRAN II :Dokumentasi wawancara
peneliti dengan informan



*Dok. Peneliti dengan kepala desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir
Seberang*



*Dok. Informan 2 : Bapak Erman Selaku Masyarakat Desa Rawang Oguang
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang*



*Dok. informan 3 : Bapak Nuar Selaku Masyarakat Desa Rawang Oguang
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang*



*Dok. Informan 4 : Bapak Erman Selaku Masyarakat Desa Rawang Oguang
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang*



*Dok.Informan 5 : Bapak Erman Selaku Masyarakat Desa Rawang Oguang
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang*



*Dok. Informan 6 : Bapak Sudir Selaku Masyarakat sekaligus ketua RT 003 Desa
Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Sungai Sorik tepatnya pada tanggal 5 Oktobe 1994 di desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupkan anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan bapak Bujang dan ibu Sariyas, dengan alamat dusun II RT 005 desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 006 Sungai Sorik pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama di SMPN 3 Pulau Kulur

Kecamatan Kuantan Hilir dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010. Setelah tamat penulis melanjutkan ketingkat atas pada Sekolah kejuruan Negeri Teluk Kuantan (SMKN I Teluk Kuantan) dengan jurusan otomotif dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) pada tahun 2016 pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Dan pada tahun 2020 penulis melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan di desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantn Hilir Seberang dengan judul penelitian yaitu "PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA RAWANG OGUANG KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2014-2019".

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 30 Agustus 2020
Penulis

CACA ANDIKA
NPM. 160411021